

**KERJASAMA PENANGGULANGAN RISIKO PENULARAN COVID-19  
KEWILAYAHAN DI KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG**

**Dicky Darsono Eka Putra<sup>1</sup>, Asep Sumaryana<sup>2</sup> Ramadhan Pancasilawan<sup>3</sup>**  
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran<sup>1,2</sup>  
Dickyekhap@gmail.com<sup>1</sup>, Ramadhanpancasilawan@unpad.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTACT**

*The score of 1.63 makes Bandung Regency an area with a high risk of Covid transmission. The compacted value is based on the growth of new clusters in the community with a small scope. The condition of the Bandung district is not good and tends to get worse. Responding to cases requires community involvement with community participation, especially through community institutions. However, with the many actors involved, it is difficult to carry out Partnership, especially the temporary regional task force and flexible organization. The purpose of this research is to describe the process of Partnership that occurs in the regional task force in Ibum sub-district. Collaborative research in managing the risk of Covid transmission using qualitative methods with a descriptive approach. Methods of collecting data using interviews, observations and literature that are adjusted to the data taken. The analysis technique is through triangulation of data and sources. The results of the research are the Partnership carried out by the regional task force in Ibum subdistrict with the variation of the work relationship process from the regional task force, Partnership is more effective and everyone can carry out work relationships according to the needs of the Partnership. However, several problems were found, such as lack of initiative, lack of awareness, and pandemic burn out that affected the psychological aspect, so it can be concluded that the Partnership between the regional task force in tackling has been carried out well but has not been maximized, because it is very difficult to manage the collaboration process when faced with multiple actors. and implemented at the community level.*

**Keywords** : Partnership, Covid Management, Regional Task Force

**ABSTRAK**

Perolehan nilai 1.63 membuat Kabupaten Bandung menjadi wilayah dengan risiko tinggi penularan Covid. Nilai yang di dapat berdasarkan bertumbuhnya klaster-klaster baru di masyarakat dengan lingkup yang kecil. Kondisi Kabupaten Bandung semakin waktu terus memburuk. Untuk merespon kasus, diperlukan pelibatan masyarakat dengan partisipasi masyarakat terutama melalui Lembaga kemasyarakatan. Namun dengan banyaknya aktor yang terlibat menjadikan kerjasama sulit dilaksanakan terlebih satuan tugas kewilayahan yang sementara dan organisasi yang bersifat *flexible*. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan proses kerjasama yang terjadi pada satuan tugas kewilayahan di Kecamatan Ibum. Penelitian kerjasama dalam penanggulangan risiko penularan Covid menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan kepustakaan yang di sesuaikan dengan data yang diambil. Teknik analisis melalui triangulasi data dan sumber. Hasil penelitian adalah kerjasama yang dilakukan satuan tugas kewilayahan yang ada di kecamatan Ibum sudah dilakukan dengan baik terutama dengan bervariasinya proses hubungan kerja dari satuan tugas kewilayahan menjadikan kerjasama lebih efektif dan setiap orang dapat melakukan hubungan kerja sesuai dengan kebutuhan kerjasama. Namun ditemukan beberapa masalah seperti kurangnya inisiatif dari para aktor yang terlibat, kesadaran beberapa untuk bekerjasama yang masih kurang, serta *pandemic burn out* yang mempengaruhi aspek psikologis maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama satuan tugas kewilayahan dalam menanggulangi sudah dilakukan dengan baik namun belum maksimal, karena sangat sulit mengelola proses kerjasama ketika dihadapkan dengan *multiple actor* dan dimplementasikan di tataran kemasayarakatan.

**Kata Kunci** : Kerjasama, Penggulungan Covid, Satuan Tugas Kewilayahan

**PENDAHULUAN**

Covid-19 menjadi salah satu penyakit paling mematikan yang pernah ada. Selain tingkat persebarannya yang begitu cepat, tingkat kematiannya sulit untuk diprediksi (Luo et al., 2020). Menyadari kemampuan penularannya sangat cepat. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD) (Kemenkes, 2020). Berdasarkan data WHO sampai tanggal 29 Oktober 2020 data sebaran Covid-19 di dunia sudah menyebabkan 216 negara terinfeksi, dengan jumlah terkonfirmasi Covid 19 sebanyak 44.351.506 orang terinfeksi dan 1.171.255 orang meninggal.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan dengan kasus tertinggi. Salah satu kasus yang disoroti peneliti pada Penanggulangan Covid-19 di salah satu daerah dengan kasus tertinggi di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Barat. Dilihat secara skoring risiko Covid-19 di Provinsi Jawa Barat memiliki nilai yang berberda mulai dari risiko rendah, risiko sedang sampai risiko tinggi. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel 1 berikut :

**Tabel 1. Skoring Level Risiko Covid-19 di Provinsi Jawa Barat Data 19 November – 15 November 2020**

No	Kabupaten/Kota	Data 2 Nov-8 Nov 2020		Data 9 Nov-15 Nov 2020	
		Risiko	Skor	Risiko	Skor
1.	Kota Cimahi	Sedang	1,85	Tinggi	1,48
2.	Kab Bandung	Sedang	2,12	Tinggi	1,63
3.	Kota Bekasi	Tinggi	1,74	Tinggi	1,64
4.	Kab. Tasikmalaya	Sedang	2,40	Tinggi	1,69
5.	Kab. Purwakarta	Sedang	2,07	Tinggi	1,72
6.	Kab Karawang	Tinggi	1,79	Tinggi	1,74
7.	Kab. Bekasi	Tinggi	1,79	Tinggi	1,74
8.	Kota Bandung	Sedang	1,96	Sedang	1,83
9.	Kota Bogor	Sedang	1,97	Sedang	1,85
10.	Kab. Bogor	Sedang	1,93	Sedang	1,94
11.	Kota Depok	Sedang	1,94	Sedang	2,00
12.	Kab. Indramayu	Rendah	2,54	Sedang	2,03
13.	Kab. Sukabumi	Sedang	1,82	Sedang	2,04
14.	Kab. Majalengka	Sedang	2,28	Sedang	2,06
15.	Kab. Cirebon	Sedang	2,20	Sedang	2,10

No	Kabupaten/Kota	Data 2 Nov-8 Nov 2020		Data 9 Nov-15 Nov 2020	
		Risiko	Skor	Risiko	Skor
16.	Kota Tasikmalaya	Sedang	2,43	Sedang	2,10
17.	Kab. Subang	Sedang	2,35	Sedang	2,20
18.	Kota Cirebon	Sedang	2,11	Sedang	2,20
19.	Kab. Bandung Barat	Sedang	2,19	Sedang	2,26
20.	Kota Sukabumi	Rendah	2,41	Sedang	2,35
21.	Kab. Kuningan	Sedang	2,35	Sedang	2,39
22.	Kab. Pangandaran	Sedang	2,31	Rendah	2,42
23.	Kab. Sumedang	Rendah	2,47	Rendah	2,45
24.	Kab. Ciamis	Sedang	2,32	Rendah	2,48
25.	Kab. Garut	Rendah	2,54	Rendah	2,52
26.	Kota banjar	Rendah	2,53	Rendah	2,53
27.	Kab. Cianjur	Rendah	2,46	Rendah	2,55

Sumber : Sub Divisi Data dan Kajian Epidemiologi, Divisi Penanganan Kesehatan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat

Berdasar tabel 1 memperlihatkan skor risiko yang diterima setiap daerah di provinsi Jawa Barat. Terdapat 7 daerah yang mempunyai risiko tinggi salah satunya adalah Kabupaten Bandung. Pada tanggal 9-15 November 2020 Kabupaten Bandung memiliki nilai yang rendah yaitu 1,63 point yang menempatkan Kabupaten Bandung menduduki posisi ke-2 dalam rata-rata nilai risiko tinggi penularan Covid di badingkan wilayah lain di Provinsi Jawa Bawat. Selain nilai yang rendah jika di bandingkan dengan tanggal 2-8 November memiliki perbandingan nilai yang cukup besar. Hanya dengan waktu 8 hari perbandingan skor mencapai 0,49 poin, dan ini menjadi salah satu perbandingan tertinggi dan memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan.

Nilai tersebut diakibatkan salah satunya ada pertubuhan pada klaster keluarga di Cimenyan dan Ciparay ketika kegiatan aqiqah. Selain itu ada klaster pesantren yang menyumbang kasus Covid-19. Bupati Kabupaten Bandung Dadang Naser menjelaskan nilai kali ini bukanlah terjadi pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung melainkan klaster Pesantren dan lingkup kecil sepeti rukun tetangga (RT) (Iqbal, 2020).

Dengan nilai tersebut menempatkan Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang memiliki level risiko Covid-19 tinggi yang disebut zona merah Covid-19. Tentunya zonasi akan mempengaruhi kebijakan yang akan di ambil selanjutnya. Setidaknya ada 4 zona yang saat ini diterapkan provinsi Jawa Barat, penetapan ini berdasarkan skoring yang dilakukan pemerintah seperti yang ada pada tabel 1. Keterangan zonasi dapat dilihat dalam tabel 2 berikut :

**Tabel 2. Skoring level risiko Covid-19**

No	Keretangan skoring	Level Risiko	Zona
1	1 – 1,8	Tinggi	Merah
2	1,9 – 2,4	Sedang	Oranye
3	2,5 – 3,0	Rendah	Kuning
4	Pernah ada kasus namun sudah sembuh dan 4 minggu tdak ada kasus	Tidak ada kasus	Hijau
5	Tidak tercatat kasus positif	Tidak terdampak	

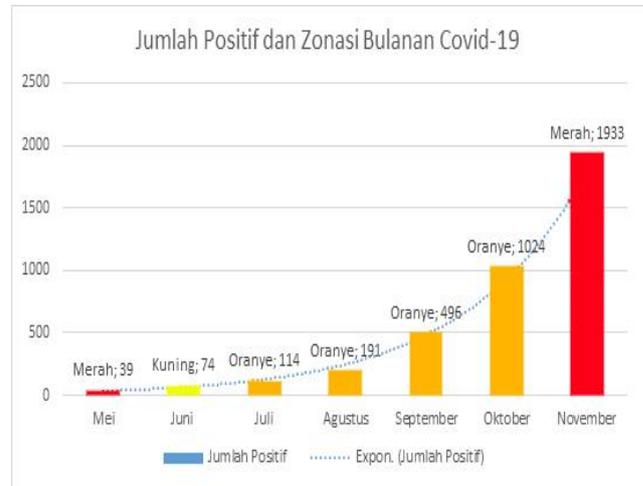
Sumber : Sub Divisi Data dan Kajian Epidemiologi, Divisi Penanganan Kesehatan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat

Perolehan nilai 1,63 mentapkan Kabupaten Bandung dengan wilayah Zona merah (level risiko tinggi Covid). Empat zona tersebut ditentukan berdasarkan pengumpulan dan analisis dari tim pakar gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 (GTPPC19) dari beberapa indikator, seperti laju orang dalam pemantauan (ODP), laju pasien dalam pengawasan (PDP), laju perkembangan pasien positif, laju kesembuhan (*recovery rate*), laju kematian (*case fatality rate*), laju reproduksi instan (Rt), laju transmisi (*contact index*), laju pergerakan, risiko geografis dan 2 indikator pelayanan kesehatan.

Jika dilihat tren zonasi jumlah komulatif perbulan Kabupaten Bandung memiliki rata-rata oranye dan merah salah satunya karena penularan Covid-19 yang masih tinggi. Covid-19 di Kabupaten Bandung sampai bulan November

menyentuh angka 1933 orang terinfeksi dan peningkatan kasus positif perbulan terlihat sangat signifikan. Peningkatan dan zonasi dapat dilihat pada grafik 1 berikut:

**Grafik 1. Jumlah komulatif kasus positif dan zonasi Covid-19 di Kabupaten**



**Bandung sampai Bulan November 2020**

Sumber : Gugus tugas Covid Kabupaten Bandung dan Pusat informasi dan koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) (diolah peneliti)

Jumlah komulatif kasus Covid-19 di Kabupaten Bandung terus bertambah setiap bulannya, pada awal kemunculan sampai bulan Mei kasus di Kabupaten Bandung menyentuh angka 39 orang sedangkan pada bulan November kasus sudah bertambah menjadi 1933 orang. Secara zonasi Kabupaten Bandung mempunyai tren kurang baik, diawali dengan zona merah dan membaik dengan berubah 2 strip zona ke zona kuning tapi sampai akhir bulan Oktober Kabupaten Bandung mempunyai tren zona oranye dan bulan November zona Kabupaten Bandung kembali merah.

Kondisi Kabupaten Bndung setiap bulannya terlihat kurang baik dan cenderung memburuk. tentunya ini menjadi ke khawatiran karena secara georafis Kabupaten Bandung tidak bersinggungan langsung dengan Jakarta yang dianggap penyumbang persebaran Covid yang tinggi. Adanya penyebaran di masyarakat yang masih tinggi ditambah klaster baru muncul menyebabkan kasus komulatif positif

Covid-19 di Kabupaten Bandung masih terus bertambah setiap harinya.

Kenaikan kasus bertambah disebabkan oleh belum terbiasanya masyarakat dengan protokol kesehatan terutama pada tempat tertutup seperti perkantoran, masyarakat cenderung memakai protokol kesehatan hanya di ruang terbuka. Kesadaran masyarakat masih rendah sehingga dalam keseharian mereka enggan memakai protokol kesehatan. Pelonggaran aktivitas di berbagai sektor pun menjadi permasalahan baru dan menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus COVID-19 Kabupaten Bandung. (Sutrisno, 2020)

Alasan lain yang menyebabkan kondisi demikian terjadi salah satunya, Covid-19 sudah berada di tengah masyarakat itu sendiri yang membuat Kabupaten Bandung menjadi wilayah transmisi lokal Covid-19. Menurut kemenkes melalui *Infeksi Emerging* Covid-19 di Kabupaten Bandung penyebarannya sudah terjadi antar masyarakat dan keberadaan virus sudah tersebar diantara masyarakat lokal itu sendiri, sehingga seseorang bisa terinfeksi virus tanpa harus bepergian ke luar wilayah atau bertemu dengan orang asing di luar wilayahnya. Karena Covid sudah berkembang di masyarakat maka pelibatan masyarakat dirasa penting untuk merespon infeksi Covid-19 di Kabupaten Bandung agar tidak terus meningkat. Dengan pelibatan masyarakat terutama melalui lembaga kemasyarakatan dalam proses penanganan Covid-19 dengan kegiatan memberikan sosialisasi, bekerjasama dengan unit kesehatan menyalurkan informasi penting, dan bersama-sama melakukan pengawasan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bandung dapat lebih efektif, efisien dan tepat sasaran dalam penanganan wabah tersebut (Pembab Bandung, 2020)

Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan risiko Covid-19. Kabupaten Bandung mewajibkan setiap kecamatan membentuk tim gugus tugas Covid-19 kecamatan

hingga desa (Nasear, 2020). Pemerintah Kabupaten Bandung memandang aparat desa perlu untuk bentuk gugus tugas Covid-19, yang tertuang pada surat edaran (SE) Bupati Bandung nomor 443.1/930/diskominfo tentang panduan dan peran masyarakat dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 serta penanganan jenazah Covid-19 di Kabupaten Bandung (Pembab Bandung, 2020). Kabupaten Bandung menilai keterlibatan semua pihak sangat penting baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha sehingga hasil yang diharapkan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Fungsi gugus tugas Covid-19 setingkat Desa/Kelurahan yaitu Pertama memantau ODP Covid-19 yang tidak memiliki tempat isolasi yang layak, kedua menyiapkan lokasi karantina bagi ODP dan wilayah padat penduduk, atau yang tidak mempunyai tempat isolasi yang layak, ketiga mengurus pemberian santunan kepada ODP yang memenuhi syarat untuk disantuni, ke empat melaporkan kasus baru kepada puskesmas terdekat, kelima menjadi koordinator pemulasaran jenazah kasus Covid-19, ke enam mengumpulkan laporan dari gugus tugas setingkat RW, dan meneruskan laporan pada pihak terkait

Gugus tugas Covid-19 memiliki perangkat yaitu koordinator lapangan, yang bertugas melakukan survei dan verifikasi informasi, koordinator kesehatan yang bertugas memastikan akses dan fasilitas kesehatan, koordinator dokumen pendudukan yang bertugas mengurus data dan administrasi, koordinator kesejahteraan warga yang bertugas mengatur pemenuhan logistik warga koordinator kebersihan yang bertugas mengatur kebersihan lingkungan dan tempat isolasi sementara dan koordinator keamanan yang bertugas melakukan pengamanan wilayah sekitar tempat isolasi sementara. Setelah itu masing-masing RW melapor ke gugus tugas Covid-19 setingkat kelurahan setiap hari

Pembentukan gugus tugas kecamatan dan desa ini untuk mempermudah

koordinasi antar lapisan (Pemkab Bandung, 2020). Pembentukan gugus tugas kecamatan dan desa menjadi salah satu alasan peneliti mengambil Kabupaten Bandung sebagai lokasi penelitian karena sangat jarang daerah yang mewajibkan kecamatan dan desa membentuk gugus tugas Covid-19, dengan konsekuensi jika tidak adanya gugus tugas tingkat desa atau kecamatan maka anggaran dari Kabupaten Bandung ke desa dan kecamatan tidak bisa dicairkan. Mengedepankan kerjasama antar lapisan ditambah kerjasama dengan tenaga kesehatan seperti dengan puskesmas menjadi fokus penelitian peneliti untuk menerangkan proses kerjasama dalam penanggulangan risiko Covid-19 di Kabupaten Bandung.

Surat edaran (SE) Bupati Bandung nomor 443.1/930/diskominfo merupakan penegasan bahwa aspek yang ingin dikembangkan Kabupaten Bandung adalah kecamatan dan desa sebagai penggerak penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bandung. Dengan partisipasi masyarakat melalui satuan tugas kecamatan dan desa diharapkan penanggulangan Covid-19 tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan dan aparat, melainkan peningkatan peran masyarakat.

Kabupaten Bandung Terdiri dari 20 kecamatan yang pergerakan angka Covid masih bergerak dinamis pada setiap kecamatan dan proses penularannya sangat sulit diprediksi. Dilihat dari aspek kerjasama kecamatan Igun salah satu daerah paling menonjol menerapkan kerjasama dengan banyak pihak. Kecamatan Igun menggandeng MUI dan Polisi Sektor Igun untuk terlibat aktif dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bandung (Susanti, 2020). Kecamatan Igun menambah peran lain seperti memasukan PT. Pertamina dengan program pelatihan proses kerja dan pelayanan pelanggan berbasis protokol kesehatan (Santia, 2020)

Dengan banyaknya aktor yang terlibat menjadikan kerjasama pun sulit untuk dikerjakan, terlebih kerjasama yang ada di satuan tugas bersifat sementara karena

organisasi satuan tugas bersifat *flexible*. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan proses kerjasama yang terjadi pada satuan tugas kewilayahan di Kecamatan Igun

Penelitian serupa sudah banyak dilakukan namun belum ada yang menyoroti kerjasama organisasi di elemen masyarakat serta penelitian serupa tidak dihadapkan dengan bencana non alam yang panjang seperti pandemi Covid yang sedang terjadi.

## METODE

Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data primer yang diambil adalah berdasarkan wawancara kepada informan Kepala Desa Laksana dan Lampegan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Bidan Desa, Kepala Kecamatan Igun, serta Kepala Puskesmas Igun. Selain itu data sekunder dari penelitian ini adalah berupa petunjuk teknis gugus tugas desa tanggap Covid, laporan kegiatan, data keuangan dan berbagai literatur lain yang berhubungan program gugus tusa desa tanggap Covid serta kemampuan peneliti meriview data tersebut dan menuliskan dalam bentuk makna yang terstruktur (Cresswell, 2014).

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan kepustakaan yang disesuaikan dengan data yang diambil. Kebutuhan data akan disesuaikan dengan inti permasalahan yang akan ditarik kesimpulannya nanti. Kesimpulan yang akan ditarik ini mengenai informasi tentang implementasi gugus tugas desa tanggap Covid di Kecamatan Igun. Penelitian ini dilakukan pada bulan 11 februari 2021 sampai 2 Januari 2022.

## HASIL

### Pelaku kerjasama

Pelaku kerjasama dalam penanggulangan Covid-19 di kecamatan Igun sangat banyak. Susunan pelaksanaan kegiatan dibagi kedalam 3 tingkatan

sedangkan satuan tugas kewilayahan dibagi kedalam 2 tingkatan. Perbedaan nya hanya pada masuk elemen masyarakat setempat kedalam satuan tugas. Aktor dalam satuan tugas kecamatan dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

**Tabel 3. Susunan satuan tugas kecamatan Ibum**

Jabatan	Pelaksana	keterangan
Ketua :	Ajat Sudrajat, SH, SE, M.Si	(Camat Ibum)
Wakil Ketua :	Iptu Carsono, SH Sukandar	(Kapolsek Ibum) (Danramil Paseh Ibum)
Sekretariat :	Deden Zainal A, SH, M.MPd Asep Suherman, S.Pd Drs. H Enday S, M.Si Yanto R Engkus Kusnadi	(Sekcam) (Kasi PMD) (Kasi Sosbud)
Koordinator bidang operasi :	H Engkon, S.Pd UPT PSA UPT Pendidikan MUI Kecamatan	(Kanit Satpol PP)
Koordinator Bidang Pencegahan :	Anggota Kepolisian Anggota TNI Karang Taruna	(Ibum) (Koramil Paseh Ibum) (Ibum)
Koordinator bidang penanganan :	H. Candra Sopiana H. Yunus	(Ka. Puskesmas Ibum) (Ka. Puskesmas Sudi)
Koordinator bidang Logistik :	Karyawan Yankes Hj. Rina S.Pd, M.Si Karyawan Yankes Ibum FKKS Kecamatan Ibum	(Ketua TP PKK Kecamatan)
Koordinator bidang penanganan dan gakum :	Aiptu Yayasan S Aiptu Jajang Para Para Babinsa	
Koordinator bidang penyediaan alat kesehatan :	Yankes Ibum Yankes Sudi	

Sumber: Pemerintah Kecamatan Ibum

Dalam tabel 3 terdapat susunan satuan tugas yang terdiri dari jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 6 jabatan koordinator. Dalam susunan terdapat lebih dari 14 organisasi yang tergabung dalam satuan tugas kewilayahan tingkat kecamatan yang menjadi sumber daya untuk menanggulangi Covid-19 di wilayah kecamatan Ibum. Satuan tugas kewilayahan tingkat kecamatan dipimpin oleh kepala kecamatan Ibum yang menjadi *top leader* dalam penanggulangan risiko di kecamatan. Sedangkan aktor yang berkerjasama dalam tingkatan desa dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

**Tabel 4. Susunan satuan tugas Desa tanggap Covid-19**

No	Posisi	Nama / Unsur	Keterangan
1	Penanggung Jawab	Sutar Asep Sudirman Epen Ropendi	Kepala Desa Bhabinkamtibmas Desa Lampegan Babinsa Desa Lampegan
2	Ketua	Pipin Aripin, S.Pd	Sekretaris Desa (Sekdes)
3	Wakil Ketua	Yana Usep Setiana	Kepala seksi kesejahteraan rakyat (Kasi Kesra)
4	Sekretaris	Reza Fernanda	Kepala urusan keuangan
5	Koordinator bidang kesehatan	Rida Ridianti Am.Keb Rosmanah	Bidan Desa
6	Koordinator hubungan masyarakat	Ali Sulaeman Aep Saepullah Pam Ketua RW M. Toto	Anggota Puskesmas Kadus II
7	Koordinator Transportasi	Tatan rustandi Tatang R	Kadus III
8	Koordinator Logistik	Yandi Dadi S Ahmad S	Ketua LPMD Kadus I Staff Desa Kepala urusan Perencanaan BPD LPMD

- 9 Koordinator  
Keamanan Didin  
Syarifudin S.Pd  
Anggota  
unsur  
desa

Sumber : Pemerintah Desa Lampegan, Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung

### Proses kerjasama (*Partnership Proses*)

Pada penanggulangan Covid-19 masalah yang muncul sangat kompleks dan beragam maka diperlukan suatu kerjasama atau tindakan saling mendukung, menunjang, dan membantu pelaksanaan setiap program. Pelaksanaan Kerjasama dalam penanggulangan Covid-19 disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dimana kerjasama dibagi ke dalam 3 kategori sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaannya. 3 kategori tersebut yaitu satuan tugas Covid kewilayahan tingkat kecamatan, satuan tugas Covid kewilayahan tingkat Desa, dan Kemasyarakatan yang terdiri dari Rt, Rw, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan beberapa masyarakat yang berpengaruh di wilayahnya.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat akan erat hubungannya dengan dengan satuan tugas kewilayahan tingkat desa dan sebaliknya. Satuan tugas kecamatan sangat erat hubungannya dengan dengan satuan tugas tingkat desa. Satuan tugas desa memiliki peranan penghubung antara satuan tugas tingkat kecamatan dan kemasyarakatan,

Proses kerjasama dilakukan secara *multiple aktor* dimana dalam satu kegiatan akan memerlukan banyak pihak yang terlibat. Satuan tugas kewilayahan umumnya memiliki 2 tingkat yaitu pada tingkat kecamatan dan pada tingkat desa. Meskipun sama-sama mempunyai kewenangan dalam penanggulangan Covid-19 di Kecamatan Ibum, dua tingkatan memiliki karakteristik yang berbeda yang akan mempengaruhi bagaimana kerjasama dalam proses kerjasama berlangsung. Dalam satuan tugas kewilayahan tingkat kecamatan lebih fokus pada aspek

prosedural, satuan tugas tingkat kecamatan di kecamatan Ibum membuat beberapa legislasi atau aturan yang nantinya akan dikordinasikan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Ibum. Sedangkan dalam satuan tugas kewilayahan tingkat desa lebih banyak menjalankan legislasi yang diberikan oleh satuan tugas kewilayahan tingkat Kecamatan.

Menurut informan intruksi yang diberikan oleh satuan tugas kewilayahan tingkat kecamatan kepada satuan tugas tingkat desa sering kali tidak sesuai pekerjaan mereka, sehingga masyarakat banyak yang menolak ketika satuan tugas desa melakukan tugas nya. Salah satu contohnya adalah dalam surat edaran tentang pemberhentian pasar tumpah di beberapa daerah seperti Ibum, Lampegan, dan Cieuri. disebutkan bahwa setiap pedagang diharuskan menutup kios mereka karena kasus di kecamatan Ibum yang meningkat sangat tinggi. proses penegakan ini dilakukan oleh desa beserta jajarannya mulai dari sekdes sebagai kepala satuan tugas desa tanggap Covid dan jajarannya, serta dibantu oleh babinsa dan babinmas. para pedagang merasa keberatan karena menurut pedagang yang ada yang menjadi penegak adalah pihak satuan polisi pamong praja (satpol PP) kecamatan yang tergabung dalam satuan tugas Covid kewilayahan tingkat kecamatan. Ketika pelaksanaan penertiban satuan tugas desa tidak bersama Satpol PP. Kerjasama dengan instansi terkait tidak bisa menyebabkan sulitnya menertibkan pedagang yang berjualan, terlebih yang melakukan penindakan hanya dilakukan beberapa orang, sedangkan pedagang yang ada tergabung dalam pasar tumpah tersebut cukup banyak.

Jika ditelaah dari dalam organisasi (*intra organizational*) kerjasama terlihat lebih baik, terlebih dengan adanya tambahan program PPKM dan pendirian posko-posko yang tersebar di kantor-kantor desa sangat membantu, karena para petugas bisa berkumpul pada posko tersebut. Dengan adanya posko akan memudahkan

hubungan kerja dalam penanggulangan Covid

### Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi antara bagian-bagian atau individu-individu baik didalam organisasi maupun dengan pihak luar organisasi sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan satuan tugas kewilayahan baik di tingkat kecamatan, desa maupun masyarakat. Unsur penting yang terdapat dalam organisasi adalah adanya susunan hierarkhi, artinya dalam organisasi yang baik memang bagian-bagian atau kelompok yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi perlu ada yang memimpin, membimbing, mengarahkan, merencanakan dan mengawasi serta mengendalikan jalan kegiatan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang menyebabkan terdapat pihak-pihak yang memimpin dan dipimpin.

Menariknya susunan hierarkis yang ada di satuan tugas kewilayahan tingkat kecamatan kebanyakan beranggotakan organisasi kemasyarakatan yang saling bekerja sama dalam penanggulangan Covid-19. *Top leader* dari satuan tugas kewilayahan ada di kecamatan dengan kepala kecamatan yang memegang kendali manajerial. Sedangkan yang menjadi *leader* dari operasional adalah puskesmas. Setiap hubungan kerja yang terjadi kebanyakan berasal dari satuan tugas tingkat kecamatan melalui legitimasi nya, maupun puskesmas berdasarkan perkembangan Covid di masyarakat.

Lebih jauh satuan tugas pada tingkatan desa memiliki *leader* nya tersendiri. Biasanya leader dipegang oleh sekretaris desa. Adanya susunan hierarkhis itulah yang membedakan organisasi dengan kelompok atau gerombolan orang yang kebetulan bersama-sama bekerja, meskipun mungkin juga dengan tujuan yang sama. Berdasarkan hasil observasi, satuan tugas kewilayahan memakai berbagai hubungan kerja sekaligus. Hal ini tidak terlepas dari

*multiple aktor* yang ada di satuan tugas kewilayahan yang memungkinkan terjadinya proses hubungan yang bermacam-macam.

Hubungan kerja horizontal. Hubungan kerja antar pimpinan pada kedudukan yang sama. Hubungan kerja ini harusnya terjadi pada hubungan antar satuan tugas tugas baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Sayangnya hubungan ini belum terjalin dengan baik, karena setiap satuan tugas hampir jarang melakukan hubungan kerja yang bersifat horizontal

Hubungan satuan tugas lebih banyak pada hubungan kerja Vertikal (garis lurus kebawah/Tegak) Hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan Terjadi pada gugus tugas kecamatan dan desa. Hubungan ini juga yang membedakan antara koordinasi dengan kolaborasi. Selanjutnya hubungan kerja diagonal adalah Hubungan kerja antara pejabat yang berbeda lembaga/induk organisasi. Contoh secara tersirat puskesmas dan kecamatan memiliki induk organisasi yang berbeda, meskipun begitu puskesmas harus selalu memiliki hubungan kerja dengan kecamatan

Dalam penanggulangan Covid juga terjadi hubungan konsultatif. Hubungan kerja tersebut dilakukan dengan melakukan konsultasi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Puskesmas menjadi titik fokus dari hubungan konsultatif dimana setiap organisasi akan melakukan konsultasi dengan mengenai hal-hal yang terkait dengan penanggulangan Covid di wilayah Kecamatan Ibum

Banyaknya aktor yang terlibat memungkinkan untuk memakai cara hubungan yang baik dengan begitu hubungan bervariasi nya hubungan yang ada di satuan tugas kewilayahn memungkinkan proses kerjasama yang dilakukan menjadi lebih bervariasi lebih efektif dan setiap orang dapat melakukan hubungan kerja dengan siapapun sesuai dengan keperluan kerjasama.

### Hubungan formal dan informal

Untuk memaksimalkan kerjasama, satuan tugas kewilayahan harus memaksimalkan 2 jenis hubungan organisasi yaitu hubungan formal dan hubungan informal. Hubungan formal adalah yaitu hubungan kerja antar lembaga atau pejabat yang dilakukan sesuai dengan garis garis wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam tingkatan (Hierarkhis)

Berdasarkan hasil observasi peneliti, satuan tugas kewilayahan sudah berupaya optimal untuk memaksimalkan hubungan formal. Hal tersebut ditandai dengan ketentuan - ketentuan tentang pembentukannya, ketentuan yang mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Ketentuan tersebut sudah atur dan disahkan oleh pejabat setempat baik itu satuan tugas kewilayahan tingkat kecamatan maupun desa. Selain sudah dibuatnya penggolongan jabatan dan uraian tugas dalam penanggulangan penularan risiko Covid-19 maka hierarki atau tingkatan serta hubungan atasan dan bawahan, hubungan bagian yang semuanya secara jelas digambarkan dengan suatu skema organisasi, dengan adanya penegasan soal sistem wewenang dan tanggung jawabnya serta penegasan soal pelimpahan, wewenang dan lingkup pengendaliannya

Selanjutnya kerjasama dalam hubungan informal sebagai hubungan antara pribadi dalam organisasi atau dengan pihak lain diluar organisasi yang berdasarkan perikatan yang sifatnya pribadi (suka dan tidak suka). Dalam setiap organisasi tidak dapat dihindarkan dengan adanya hubungan informal, karena hubungan ini tumbuh dengan sendirinya sejalan dengan hakekat manusia dengan segala sifat sebagai makhluk sosial. Hubungan informal yang terjadi dalam penanggulangan risiko penularan Covid-19 sudah kuat terutama menyangkut hubungan yang ada di organisasi salah satunya satuan tugas kewilayahan desa yang sudah sangat mengenal dengan anggota di desanya dan menjadi keuntungan untuk menjalin hubungan informal satu sama lain.

Tapi yang perlu ditingkatkan adalah hubungan informal antar organisasi yang tergabung di satuan tugas. Hubungan informal antar organisasi sangat jarang dipakai padahal penggunaan hubungan informal sangat penting untuk dilakukan. Menurut informan dari organisasi yang masuk satuan tugas kewilayahan tingkat desa, peran *leader* pada organisasi tataran kecamatan masih kurang merangkul organisasi di bawahnya.

Dalam penelitian ini hubungan informal yang menjadi tantangan adalah antara organisasi ke organisasi. Meskipun sudah dibuat suatu wadah bernama satuan tugas pelaksanaannya masih perlu perbaikan. Hal ini diakibatkan karena setiap organisasi berbeda, memiliki kebiasaan, tugas dan karakteristik yang berbeda. Selain itu tempat jarak dan rentang komunikasi menjadi salah satu alasan hubungan informal sulit terbangun dengan baik.

Hubungan informal terutama dalam hal yang “darurat” akan meningkatkan semangat kerja, mengokohkan dedikasi setiap anggota terhadap organisasi, menambah pengertian-pengertian yang tepat tentang sifat masing-masing, mengadakan pendekatan yang tepat didalam proses penggulungan risiko penularan Covid. Fenomena tersebut banyak terjadi ketika penanganan lonjakan kasus, dimana setiap pihak yang terlibat harus siap, kapan pun dimanapun, ketika ada pelaporan kasus konfirmasi yang masuk ke puskesmas yang disalurkan ke organisasi yang bersangkutan. Kejadian seperti isolasi darurat, penanganan, sampai pemulasaran jenazah Covid-19 tidak mengenal waktu dan tempat, maka komitmen setiap pihak yang terlibat sangat dibutuhkan.

Kerjasama semua pihak menjadi tantangan terutama pada *top leader* yang mengkoordinir semua hubungan kerja maka sukses tidaknya seorang pimpinan sering diukur dari keberhasilannya memadukan nilai-nilai positif dari kedua jenis hubungan dalam organisasi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan hubungan

kerja baik formal maupun informal dalam penanggulangan Covid selalu diperlukan komunikasi kesemua arah dan timbal balik atasan bawahan, antar atasan, antar bawahan, baik internal maupun eksternal

## PEMBAHASAN

Pembuatan Satuan tugas kecamatan yang ada di kecamatan ibun dilatarbelakangi pada kasus Covid yang semakin memburuk setiap harinya maka dengan dibuatnya satuan tugas Covid di tingkat kewilayahan membuat kerjasama antar pihak lebih terjadi karena pada dasarnya kerjasama dilakukan untuk memecahkan persoalan dalam lingkungan dan sistem yang kompleks (Tranfield et al., 2005).

Kerjasama satuan tugas kewilayahan dalam menanggulangi sudah dilakukan dengan baik namun belum maksimal, karena sangat sulit mengelola proses kerjasama dengan beberapa tingkatan (Du et al., 2021). Susunan hierarkis yang ada di satuan tugas kewilayahan tingkat kecamatan kebanyakan beranggotakan organisasi-organisasi yang saling bekerja sama dalam penanggulangan Covid-19. Dalam tingkat satuan tugas kewilayahan tingkat desa ditemukan banyaknya elemen masyarakat yang terlibat.

Banyaknya aktor yang terlibat memungkinkan untuk memakai cara hubungan yang baik dengan begitu hubungan bervariasi nya hubungan yang ada di satuan tugas kewilayahn memungkinkan proses kerjasama yang dilakukan menjadi lebih bervariasi lebih efektif dan setiap orang dapat melakukan hubungan kerja dengan siapapun sesuai dengan keperluan kerjasama. Meskipun begitu terjadi beberapa masalah dalam pelaksanaan kerjasama.

Masalah yang terjadi pada kerjasama adalah kurangnya inisiatif dari pelaksana, seperti pada satuan tugas tingkat desa ketika menangani pasien, terdapat aktor yang beranggapan bahwa penanggulangan sudah ada bidan desa dan puskesmas yang

turun tangan, dan hanya menunggu laporan dan perintah dari bidan desa yang melakukan penanggulangan kepada pasien. Tentunya hal ini menjadi salah satu indikasi kerjasama yang belum terjalin dengan baik.

Dalam penelitian ini juga hubungan-hubungan antar anggota dari satuan tugas kewilayahan yang masih belum terjalin dikarenakan beberapa aktor dalam satuan tugas memiliki kesadaran yang masih kurang terhadap pandemi yang terjadi dimana masih banyak anggota yang abai terhadap pelaksanaan penanggulangan. hal tersebut mendukung Lehman, Lamb, and D'Alessandro (2021) dengan kesadaran yang kurang menyebabkan kasus Covid sulit ditangani. Kebanyakan hal ini terjadi pada tataran desa dan masyarakat yang menyebabkan proses kerjasama menjadi terganggu. Meskipun jika ditanya mereka siap dalam menanggulangi Covid-19 di wilayahnya namun perilaku dan kegiatan banyak yang tidak mencerminkan hal demikian (Rosidin et al., 2020).

Kondisi lain yang hubungan dari anggota dari satuan tugas kewilayahan ditemukan fenomena *pandemic burn-out* dimana masyarakat mulai capek dan jenuh dengan adanya Covid-19. *Pandemic burn out* ini akan sangat pengaruh terhadap aktor yang sedang behadapan dengan Covid-19 (Queen & Harding, 2020). Fenomena *pandemic burn out* terjadi di semua lini yang menghambat proses kerjasama. Kebanyakan yang merasakan *pandemic burn out* ini sudah mulai acuh perkebanggan Covid, mulai dari kasus, program sampai pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Covid-19. Menurut informan *pandemic burn out* ini sangat mengganggu untuk proses kerjasama, terutama ketika adanya kenaikan kasus yang tinggi serta sumber daya terbatas, tenaga kesehatan yang sudah kewalahan, peran bantuan dari sektor lain sangat diperlukan.

## KESIMPULAN

Kerjasama satuan tugas kewilayahan dalam menanggulangi sudah dilakukan

dengan baik namun belum maksimal, karena sangat sulit mengelola proses kerjasama yang dibagi kedalam kedalam 3 tingkatan. Namun dengan bervariasinya proses hubungan kerja dari satuan tugas kewilayahan, kerjasama bisa lebih efektif dan setiap orang dapat melakukan hubungan kerja sesuai dengan kebutuhan kerjasana. Namun proses pelaksanaan kerjasama harus mengelola masalah yang muncul seperti kurangnya inisiatif dalam menagggulangi Covid terutama dari level masyarakat, kesadaran beberapa yang kurang terhadap pandemic yang terjadi dari beberapa aktor yang terlibat dalam penagggulan Covid, serta *pandemic burn out* yang mempengaruhi aspek psikologis dari aktor yang satuan tugas kewilayahan di Kecamatan Ibum.

Saran yang dapat peneliti berikan salah satunya adalah peningkatan komitmen bagi pejabat atau instansi yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab mengenai sesuatu masalah, berkewajiban memprakarsai dan mengkoordinasikan proses penagggulan Covid di kewilayahan dan harus diciptakannya lingkungan kerja yang nyaman sehingga koordinasi setiap pihak lebih efektif

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti berterima kasih serta pada seluruh bagian tadi jurnal Prepotif Jurnal kesehatan masyarakat yang telah memberikan telaah juga masukan yang positif bagi peneliti dan menerbitkan tulisan peneliti. Selain itu peneliti pada semua informan yang terlibat dalam penelitian ini, selain itu, pada dosen pembimbing beserta civitas akademik Universitas Padjajaran yang senantiasa mendukung penelitian ini. Peneliti berterimakasih pada teman teman yang selalu mendorong dan memberikan motivasi agar peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, J. A. (2014). *Research Design Qualitative-Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.).
- Du, : Zhanwei, Wang, L., Yang, B., Ali1, S. T., Tsang, T. K., Shan, S., Wu, P., Lau, E. H. Y., Cowling, B. J., Ancel, L., & Meyers4. (2021). International risk of the new variant COVID-19 importations originating in the United Kingdom. *U.S. National Library of Medicine*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1101%2F2021.01.09.21249384>
- Iqbal, M. (2020). *Kabupaten Bandung Zona Merah, Bupati: Kita Kecolongan*. 18 November. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5260227/kabupaten-bandung-zona-merah-bupati-kita-kecolongan>
- Kemenkes. (2020). Pedoman kesiapan menghadapi COVID-19. *Pedoman Kesiapan Menghadapi COVID-19*, 0–115.
- Lehman, C. D., Lamb, L. R., & D'Alessandro, H. A. (2021). Mitigating the Impact of Coronavirus Disease (COVID-19) Vaccinations on Patients Undergoing Breast Imaging Examinations: A Pragmatic Approach. *American Journal of Roentgenology*, 217(3), 584–586. <https://doi.org/10.2214/ajr.21.25688>
- Luo, H., Tang, Q. ling, Shang, Y. xi, Liang, S. bing, Yang, M., Robinson, N., & Liu, J. ping. (2020). Can Chinese Medicine Be Used for Prevention of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)? A Review of Historical Classics, Research Evidence and Current Prevention Programs. *Chinese Journal of Integrative Medicine*, 26(4), 243–250. <https://doi.org/10.1007/s11655-020-3192-6>
- Nasear, D. (2020). *Di Kabupaten Bandung, Seluruh Kecamatan Wajib Bentuk Tim Gugus Tugas*. Republik Merdeka Jabar.

- Pemkab Bandung, B. P. dan K. P. (2020). *Pemkab Bandung Siapkan Gugus Tugas Covid – 19 Tingkat Desa*. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.  
<http://www.bandungkab.go.id/arsip/pemkab-bandung-siapkan-gugus-tugas-covid-19-tingkat-desa>
- Queen, D., & Harding, K. (2020). Societal pandemic burnout: A COVID legacy. *International Wound Journal*, 17(4), 873–874.  
<https://doi.org/10.1111/iwj.13441>
- Rosidin, U., Rahayuwati, L., & Herawati, E. (2020). Perilaku dan Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid -19 di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut. *Umbara*, 5(1), 42.  
<https://doi.org/10.24198/umbara.v5i1.28187>
- Santia, T. (2020). *Pertamina Bantu UMKM Kamojang Bangkit dari Tekanan Covid-19*. Liputan6.Com.  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4395966/pertamina-bantu-umkm-kamojang-bangkit-dari-tekanan-covid-19>
- Susanti, M. (2020). *Polsek Ibum Polresta Bandung Gandeng Ketua MUI Saat Laksanakan Ops Yustisi Covid-19 di Kecamatan Ibum*. Kopol.Info.  
<https://kopol.info/polsek-ibun-polresta-bandung-gandeng-ketua-mui-saat-laksanakan-ops-yustisi-covid-19-di-kecamatan-ibun/>
- Sutrisno, D. (2020). *Meningkatnya Kasus COVID-19 di Bandung Akibat Warga Tak Disiplin 3M Pengawasan dan penindakan dari aparat terasa minim*. IDN- Times.  
<https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/meningkatnya-kasus-covid-19-di-bandung-akibat-warga-tak-disiplin-3m/3>
- Tranfield, D., Rowe, A., Smart, P. K., Levene, R., Deasley, P., & Corley, J. (2005). Coordinating for service delivery in public-private partnership and private finance initiative construction projects: Early findings from an exploratory study. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture*, 219(1), 165–175.  
<https://doi.org/10.1243/095440505X8037>